

HINGGA SEPTEMBER 2024

Ombudsman RI Terima 19.024 Laporan Masyarakat

JAKARTA (KR) - Ombudsman RI mencatat 19.024 laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari hingga September 2024 atau meningkat dari 14.412 laporan masuk pada periode yang sama tahun lalu.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, peningkatan tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat kepada Ombudsman RI yang meningkat sehingga jumlah laporannya bertambah lebih banyak serta proses sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang Ombudsman RI yang makin luas, sehingga akses masyarakat bertambah. "Laporan masyarakat yang masuk masih didominasi perihal layanan pemerintahan daerah, pertahanan atau agraria, kepegawaian, dan ketenagakerjaan," kata Najih seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (25/9).

Dari total laporan masyarakat masuk tersebut, Najih mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan 85 persen laporan pa-

da bulan Januari-September 2024 atau meningkat 6 persen dari sebelumnya sebesar 79 persen pada Januari-September 2023.

Najih menilai pencapaian penyelesaian laporan masyarakat itu merupakan hasil kerja keras bersama Ombudsman RI yang harus diapresiasi. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelesaian laporan, salah satunya dengan menyusun klasifikasi baru berdasarkan alasan penutupan laporan.

Selama ini, lanjutnya, laporan ditutup hanya dengan kriteria sederhana, sedang, atau berat sehingga perlu perincian lebih lanjut. Misalnya terkait dengan jumlah laporan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat, laporan yang diselesaikan melalui mediasi, serta tindakan yang ditutup karena proses dan alasan penyelesaian lainnya. "Hal ini penting untuk keperluan internal Ombudsman RI agar kualitas penyelesaian laporan

terus meningkat," ujarnya.

Najih berpendapat, klasifikasi perinci dalam penutupan laporan akan mampu menggambarkan mekanisme penyelesaian laporan yang lebih jelas dari berbagai sisi, terutama mekanisme yang paling banyak digunakan agar Ombudsman RI bisa lebih terarah dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan.

Di tengah meningkatnya laporan yang masuk, ia mengingatkan kepada seluruh kepala Perwakilan Ombudsman di daerah untuk lebih proaktif dalam menyambut momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan melakukan pendekatan persuasif terhadap para calon kepala daerah.

Hal tersebut, kata Najih, penting guna membangun komunikasi sejak dini agar kepala daerah yang terpilih dapat mendukung agenda bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Ant/San)-f



KR-Istimewa

PENGUKUHAN: Pengurus Koperasi Pengolah Sampah Sleman Sembada (Kopasmanda) dikukuhkan oleh Bupati Sleman Kustini, Selasa (24/9), di Rumah Dinas Bupati Sleman. Bupati berharap koperasi tersebut akan berperan untuk mengatasi masalah sampah di Sleman sebagai rumah bersama. Sementara Ketua Kopasmanda Ir Arif Budioni MM mengharap partisipasi seluruh warga untuk ikut berperan.

Pulihkan Sambungan hal 1

Pasal 6 TAP tersebut berbunyi, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig atau final, telah dicabut maupun telah dilaksanakan.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid merujuk Pasal 6 tersebut maka sudah tidak berlaku.

Fraksi PDIP MPR RI juga mendukung agar MPR menyesuaikan permohonan soal Tap MPR terkait Presiden Ke-2 Soeharto dan Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagaimana yang telah dilakukan MPR RI beberapa waktu lalu terhadap TAP MPR soal Presiden Soekarno.

Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI TB Hasanuddin mengatakan, permohonan tersebut sudah diajukan Fraksi Partai Golkar soal Soeharto dan Fraksi PKB

soal Gus Dur. Ia meminta MPR juga perlu merespons surat resmi dari dua partai tersebut.

"PDIP mendukung agar pimpinan MPR juga merespons surat resmi dari Fraksi Partai Golkar dan PKB di MPR tersebut sesuai dengan etika dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," kata Hasanuddin saat menyampaikan pandangan Fraksi PDIP pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024.

Adapun permohonan Fraksi Partai Golkar itu untuk mengkaji kembali Pasal 4 Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal tersebut berbunyi, upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan kepada semua pihak, termasuk secara eksplisit menyebutkan kepada Soeharto. Golkar pun meminta agar MPR mengesakan, Tap itu sudah dilakukan. (Ant/Obi)-d

Presiden Sambungan hal 1

"Saya berharap Baznas ke depan dapat melakukan terobosan-terobosan, baik melalui edukasi kepada masyarakat, yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan untuk membangun sebuah tata kelola yang baik dan profesional," ujarnya.

Sementara itu Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA menyampaikan, sampai September ini perolehan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sudah mencapai sekitar Rp 30 triliun dari 20 jutaan muzakki. Sedangkan, penerima manfaat mencapai 30an juta. Sampai akhir tahun ini ditargetkan total perolehan ZIS mencapai Rp 41 triliun. "Alhamdulillah, hasil audit sejak tahun 2021 kami memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Artinya, pengelolaan zakat kami sudah benar. Kami selalu menerapkan asas aman syafi, aman regulasi dan aman NKRI. Selama ini Baznas juga sudah banyak menerima penghargaan dari berbagai pihak," jelasnya.

Kiai Noor menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memperkenankan Baznas untuk menyelenggarakan kegiatan pembukaan Rakomas 2024 di Istana Negara IKN.

"Kehormatan ini menjadi simbol sinergi kuat an-

tarat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Baznas sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural dengan tugas Pengelolaan Zakat dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan makmur melalui pengelolaan zakat yang semakin optimal," katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Baznas dengan program-program pembangunan nasional semakin menunjukkan intensitas tinggi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Agama, KH Saiful Rahmat Dasuki, Wakil Menteri Pertanahan, Raja Juli Antoni serta perwakilan dua ormas besar Islam di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Rakomas Baznas diikuti 1.200 pesertaberasal dari unsur Pimpinan Baznas se-Indonesia dari Pusat, 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan mengangkat tema 'Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam rangka Sukses Astacita'. (Fie)-f

Wujudkan Sambungan hal 1

Pada sisi lain, Komnas HAM juga mengingatkan seluruh ASN, termasuk pejabat kepala daerah, aparatur keamanan, aparatur pertahanan dan aparatur intelijen untuk tetap menjaga netralitas selama tahapan pilkada. Dalam hal itu, menurut Pramono, tidak menunjukkan dukungan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon.

Hal itu, tegasnya, dilakukan dengan tetap menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi. Tidak hanya itu, Komnas HAM meminta pers untuk menjalankan fungsi penyiaran dan pemberitaan yangimbang, informatif dan edukatif.

Sementara itu, Kemenkumham mendorong partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2024, yakni dengan mewadahi deklarasi pilkada bagi pemilih pemula yang digelar bersamaan pencanangan Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76.

Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan, pemilih pemula memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan Indonesia. Setiap suara pemilih pemula menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa menuju arah kebijakan

yang lebih baik.

Deklarasi pilkada bagi pemilih pemula dilakukan perwakilan 26 SMA/ sederajat yang dikoordinasi komunitas binaan Direktorat Jenderal HAM, yakni Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta HAM (Koppeta HAM). Mereka hadir secara langsung maupun daring.

Di hadapan pemilih pemula tersebut, Menkumham mengajak para pemilih yang berusia 17 hingga 19 tahun itu untuk berpartisipasi aktif pada Pilkada 2024. Ia juga mengimbau pemilih pemula untuk menyalurkan hak suara dengan bijak. (Ful)-f

Indonesia Sambungan hal 1

Di ujung babak pertama, satu peluang emas yang didapat Afrisal usai menerima umpan dari Jens Raven. Sayangnya, kesempatan emas tersebut gagal berujung gol setelah bola umpan silang dari Ravens gagal dipotong secara sempurna oleh Afrisal dan akhirnya bola hanya bergulir ke samping tiang gawang. Kegagalan tersebut membuat skor 0-0 tak berubah hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, pelatih Timnas U-20 Indonesia, Indra Sjafri melakukan sejumlah perubahan pada

skuatnya demi menambah daya serang. Perubahan ini membuahkan hasil saat di menit ke-53, tendangan melengkung Aditya Warman mampu membobol gawang Maladewa. Semenit berselang, giliran Figo Denis mampu membobol gawang lawan untuk membawa Indonesia unggul 2-0.

Di menit ke-57, Indonesia semakin menggila dengan terciptanya gol ketiga lewat tendangan bebas dari Toni Firmansyah. Gol pamungkas Indonesia akhirnya tercipta di menit ke-65 melalui sontekan Jens Raven dan menutup la-

ga dengan kemenangan 4-0. Hasil ini, Indonesia memimpin klasemen dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Yaman yang juga meraih 3 poin hasil kemenangan 3-1 atas Timor Leste.

Usai laga, gelandang serang Timnas U-20 Indonesia, Dony Tri Pamungkas mengaku sangat bersyukur atas kemenangan ini. "Alhamdulillah, saya sangat senang dengan hasil ini. Kemenangan ini akan memotivasi kami untuk dua pertandingan kedepannya," ujarnya dalam siaran langsung di SCTV. (Hit)-f

KA Sambungan hal 1

Kecelakaan bermula sekitar pukul 03.45, di perlintasan palang pintu Padukuhan Gubug ada sinyal kereta akan lewat. Kemudian penjaga pintu Choirul Anam warga Surogatan Nanggulan Kulonprogo menutup palang pintu. Bersamaan dengan palang pintu mau tertutup, melintas truk molen B 9240 JIQ yang dikemudikan Suhatman warga Jogoboyo Purwodadi Purworejo dari arah utara menerobos area lintasan kereta.

Karena posisi truk sudah membahayakan, penjaga pintu menyuruh pengemudi truk keluar dari lintasan dengan menabrak palang pintu. Kemudian petugas palang pintu berlari kearah datangnya kereta memberi lampu isyarat bahaya kepada kereta yang lewat dari arah barat. Tetapi karena jaraknya sudah sangat dekat, terjadilah kecelakaan.

KA New Lirevy Taksaka jurusan Gambir - Yogyakarta No Loko CC2061378 dengan masinis Fajar Sidiq warga UPT KRU KA Yogyakarta menabrak truk molen bagian belakang. Truk terguling ke pinggir jalur

kereta. Menurut Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry, kejadian tersebut diduga karena pengemudi truk menerobos palang pintu kereta api.

Terkait kecelakaan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memproses hukum sopir truk karena menerobos pintu di Perlintasan Sebidang (JPL 714) antara Stasiun Sentolo - Stasiun Rewulu Bantul. "KAI akan melakukan upaya proses hukum atas kejadian ini. Saat ini sopir truk telah diamanatkan di Polres Bantul," kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba.

Menurutnya, kecelakaan tersebut mengakibatkan terganggunya sejumlah perjalanan kereta api, kerusakan pada bagian sarana KA New Livery Taksaka, dan prasarana pos perlintasan. Beruntung penumpang dan kru KA Taksaka selamat, namun masinis dan asisten masinis mengalami cidera yang selanjutnya dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wates. "Kerugian yang dialami oleh KAI akibat dari peristiwa tersebut, saat

ini masih dalam proses penghitungan," ujar Anne.

Ditambahkan, ada tujuh rangkaian kereta api yang mengalami keterlambatan perjalanan dampak dari kecelakaan itu. Yakni KA 90 Mataram terlambat 15 menit, KA 104 Singasari terlambat 24 menit, PLB 136a (Bogowonto) terlambat 27 menit, KA 581 (KA bandara ke YIA) terlambat 24 menit, PLB 564A (KA bandara ke Yogyakarta) terlambat 41 menit, PLB 701A (KA bandara ke YIA) terlambat 16 menit. Sementara KA 70 Taksaka setelah dievakuasi melanjutkan perjalanan ke stasiun akhir Yogyakarta, mengalami keterlambatan 192 menit.

Dengan adanya keterlambatan perjalanan kereta para penumpang, Anne memastikan KAI memberikan service recovery (SR).

"Kami mohon maaf kepada para penumpang KA yang mengalami keterlambatan akibat kejadian ini. Selanjutnya KAI akan berupaya agar kenyamanannya para penumpang tetap terjaga," pungkasnya. (Jdm/Ati)-f

Pembayaran Sambungan hal 1

Kemudahan ini pula yang secara tidak langsung akan mendorong perubahan perilaku konsumen. Gen Z dan milenial dapat menyalurkan kesukaan berbelanja untuk berbagai kebutuhan, penting atau hanya sekadar kesukaan. Pertimbangan transaksi digital pertimbangannya serasa lebih ringan dibandingkan transaksi dilakukan secara konvensional dengan pembayaran tunai.

Konsumsi meningkat dan ini dapat mendorong perkembangan ekonomi, tidak terkecuali usaha mikro dan kecil yang sudah mengikuti teknologi pembayaran digital ini.

Terlihat dari pengguna Qris misalnya, yang telah melibatkan 32,7 juta mercan atau 50,5 juta pengguna. Lalu bagaimana perubahan perilaku ini dampaknya terhadap kelas menengah di Indonesia. Saat ini, proporsi kelas menengah Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 47,85 juta penduduk. Kelas menengah ini merupakan kelompok penopang perekonomian Indonesia, karena 82 persen masyarakat berada pada kelompok ini. Selain itu, jumlah penduduk kategori menuju kelas menengah atau 'aspiring middle class' terus bertambah mencapai 137,5

juta jiwa pada tahun 2024 sementara di tahun 2019, jumlahnya 128,85 juta jiwa.

Selain mempermudah transaksi di dalam negeri, kemudahan ini juga dapat mengatasi kesulitan dan kerumitan transaksi antarnegara. Bertransaksi saat berkunjung ke negara lain, kemudahan ini juga dapat dirasakan. Kerja sama yang dikembangkan Bank Indonesia dengan lembaga dan otoritas di negara-negara ASEAN memastikan keamanan, perlindungan konsumen, dan interkoneksi yang lancar antara negara-negara ASEAN.

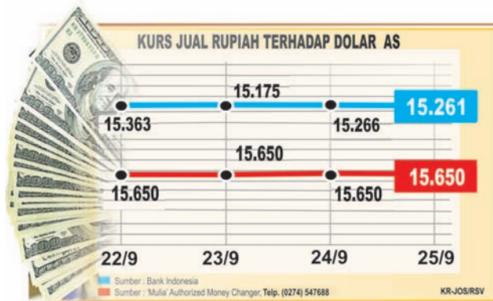
Tantangan ke depan adalah mendorong kelompok yang belum tersentuh perkembangan teknologi pembayaran digital ini. Tantangan itu lebih pada perubahan persepsi dan budaya Masyarakat untuk menggunakan sistem digital ini, selain pemerataan ketersediaan infrastruktur antardaerah. Kekhawatiran dari aspek keamanan, sampai dengan saat ini tidaklah menjadi permasalahan dalam penggunaan pembayaran digital.

Di sisi lain, kemudahan bertransaksi dan tren yang berkembang di masyarakat bagusnya adalah terjadinya peningkatan

konsumsi, tapi jangan menjadi pendorong terjadinya inflasi. Bila konsumsi itu terarah pada sektor yang mampu menciptakan kesempatan kerja, tentunya ini efek baik yang diharapkan dari perkembangan pembayaran digital. Kelompok yang tidak muda lagi pun telah meningkat minat penggunaan pembayaran digital ini. Dari strukturnya terdiri dari 48 persen usia yang tergolong generasi X, baby boomer, dan generasi alpha.

Teknologi berubah, sistem pembayaran akan juga akan berkembang ke depannya. Inti dari perkembangan itu tentunya akan bertumpu pada kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan murah biaya transaksi. Selama poin itu terpenuhi, perkembangan sistem pembayaran akan menjadi sebuah keniscayaan. Inilah yang terus digali dan dikembangkan oleh pemerintah yang tentunya mengiringi pengembangan infrastruktur transaksi yang dibutuhkan seiring perkembangan teknologi.

(Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, pengurus ISEI dan Peneliti Senior Sinergi Visi Utama Consulting)-d



Prakiraan Cuaca			26 September 2024			
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95

Dilema Upah Minimum di Indonesia



Indonesia upah minimum masih dianggap cukup rendah, bahkan ada perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum. Permasalahan pengupahan harus menjadi sorotan penting bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akankah upah yang didapat oleh pekerja mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan? Mampukah upah yang didapatkan oleh pekerja mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka? Upah minimum merupakan standar upah bulanan terendah yang digunakan oleh pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Ada beberapa jenis upah minimum seperti

upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan Upah minimum sektoral kabupaten/ kota (UMSK). Upah minimum sektoral ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan saran asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh serta pertimbangan dari dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum biasanya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun seperti UMP Daerah Istimewa Yogyakarta yang naik dari Rp. 1.981.783,39 pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 2.125.897,61 pada tahun 2024. Besaran UMK di Kota Yogyakarta juga meningkat dari Rp. 2.324.775,50 pada tahun 2023 menjadi Rp. 2.492.997

pada tahun 2024. Hakikat dari upah minimum adalah memberikan jaring pengaman dan proteksi kepada pekerja di Indonesia. Dalam situasi dan kondisi ekonomi saat ini, pekerja atau buruh menjadi pihak yang dikorbankan. Dengan adanya jaring pengaman untuk pekerja, diharapkan daya beli dan kesejahteraan pekerja tetap terjaga atau tidak menurun. Dalam penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang meliputi kebutuhan pangan 2100kcal perhari, pakaian, pendidikan, perumahan dan sebagainya. Peraturan tentang

pengupahan tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2023 sebagai pengganti PP nomor 36 Tahun 2021. Menurut pasal 26 PP nomor 51 tahun 2023 mengenai penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu yang merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. Penentuan indeks tertentu ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan Tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Apabila nilai penyesuaian upah lebih kecil atau sama dengan 0 (nol) maka upah minimum akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan. Perhitungan upah minimum yang telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kontribusi tenaga kerja tetapi dirasa belum layak karena belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup layak. Kondisi saat ini, upah minimum dapat ditetapkan belum sesuai dengan prinsip-prinsip upah layak yang dirasa belum mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup yang layak untuk pekerja dan keluarganya mencakup kebutuhan dan biaya hidup,

jaminan sosial, standar hidup relative serta termasuk kebutuhan pembangunan ekonomi dan tingkat produktifitas. Upah yang layak harus diupayakan oleh pemerintah berdasarkan prinsip pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan upah layak mengimplementasikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan merata. Dengan penetapan upah minimum yang layak bagi pekerja, mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

